

KOMPETENSI PEDAGOGIS GURU DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Drs. Abdul Malik, M.Pd
(abdulmalik@ut.ac.id)
UPBJJ-UT Surabaya

Sub Tema: Konsep Dasar Kurikulum 2013

Abstrak

Pada era Orde Baru, kita mengetahui bahwa pendidikan di semua jenjang lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif seperti kecerdasan, sistem nilai (values system), bahkan praktik-praktik atau skill siswa seringkali diabaikan. Bahkan dalam skala yang amat mikro, proses pembelajaran di hampir semua jenjang pendidikan hanya memusatkan perhatiannya pada kemampuan kognitif. Kondisi seperti ini menyebabkan pendidikan nasional di Indonesia tidak mampu menghasilkan orang-orang yang mandiri, kreatif, memiliki self awareness, dan orang-orang yang mampu mengkomunikasikan secara baik dengan lingkungan fisik dan sosial dalam komunitas kehidupannya.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan abad 21. Pada abad ini, sebagaimana dapat kita saksikan bersama kemampuan kreativitas dan komunikasi akan menjadi sangat penting. Kurikulum ini bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal itu rumusan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang digunakan dalam kurikulum 2013 mengedepankan pentingnya kreativitas dan komunikasi. Ke-depan tidak boleh tidak para guru dituntut memilki kompetensi-kompetensi yang dapat diterapkan di setiap jenjang pendidikan dan dilaksanakan dalam setiap proses belajar mengajar.

Kata kunci: kompetensi pedagogik, Implementasi, kurikulum 13

Pendahuluan

A. Kompetensi Pedagogik

Istilah 'Pedagogik' tidak akan asing bagi seorang guru, semua guru memahami apa yang dimaksud dengan Pedagogik walaupun sebenarnya sudah setiap hari dilakukannya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kepada peserta didik. Kompetensi pedagogik ini menjadi salah satu jenis kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai guru.

Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khusus yang akan membedakan profesi guru dengan profesi lainnya. Penguasaan kompetensi Pedagogik yang disertai dengan profesionalitas akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Kompetensi Pedagogik ini diperoleh melalui suatu upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra-jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan profesi keguruan lainnya dari masing-masing pribadi guru yang bersangkutan.

Kompetensi pedagogik menjadi salah satu materi yang diujikan dalam penilaian kinerja guru dan terdiri dari 7 aspek berikut. Berikut adalah 7 aspek kompetensi Pedagogik yang dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) :

1).Guru mampu mengenal karakteristik peserta didik

Dalam aspek ini guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik secara umum dan khusus untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya . Hal senada juga

dijelaskan oleh Weber dan Cooper (dalam : Nana Syaodih) bahwa kompetensi pengetahuan berkenaan dengan pemahaman kognitif dari pada siswa.

2) Guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi guru; guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar.

3) Guru mampu mengembangkan kurikulum

Dalam mengembangkan kurikulum guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan membuat serta menunjukkan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran, guru mampu menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

4) Menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap; guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik; guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik; guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran.

5) Guru mampu mengembangkan potensi peserta didik

Guru dapat menganalisis potensi setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka.

6) Guru mampu melakukan komunikasi dengan peserta didik

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan terhadap komentar atau pertanyaan peserta didik.

7) Guru mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan; guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan; guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya.

(<http://cmslokomedia.widiyanto.com/berita-141-7-aspek-kompetensi-pedagogik-guru.html>).

Beberapa kemampuan atau kompetensi seperti diuraikan di atas adalah kemampuan yang harus dimiliki guru yang menyandang jabatan profesional. Jabatan profesional yang dimiliki guru menuntut pemahaman yang mendalam, komitmen dalam menjalankan tugas sebagai guru yang menyandang tugas mulia dihadapan orang tua murid, masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Guru perlu mengenal karakteristik siswa secara individual, sehingga guru bisa memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Guru harus menguasai teori-teori belajar, mengenal lingkungan belajar, mampu merancang pembelajaran di kelas, serta mampu melakukan penilaian untuk menentukan keberhasilan atau pencapaian siswa sebagai hasil belajar.

Guru juga dituntut mampu menyampaikan pertanyaan pada siswa untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka, guru dapat memberikan perhatian dan

mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan tersebut, selain itu juga guru mampu menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum tanpa memermalukannya

B. Pengertian Kurikulum

Pendidikan formal sering juga disebut pendidikan di sekolah, tentu memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Kurikulum ini dilaksanakan di sekolah serta dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan (Nana Syaodih, 1988: 5). Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Sangat sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan di suatu lembaga pendidikan/sekolah jika tidak memiliki kurikulum.

Apabila dirinci secara lebih mendetail peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, paling tidak terdapat tiga peranan yang sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif (Hamalik, 1990).

1. Peranan konservatif, penekanannya adalah bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa.

Peranan ini pada hakekatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Salah satu tugas pendidikan adalah mempengaruhi dan membina

- perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya.
2. Peranan kreatif, bahwa kurikulum mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang.
 3. Peranan kritis dan evaluatif, menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Jika kita perhatikan, peranan kurikulum seperti diuraikan di atas, maka peran-peran kurikulum harus berjalan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Namun, jika tidak maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum pendidikan menjadi tidak optimal dan akan menjadi kendala bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, baik di skala mikro maupun di skala makro.

C. Kurikulum

Istilah kurikulum (*curriculum*) yang diterapkan dalam dunia pendidikan, adalah sejumlah mata pelajaran (*subject*) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah (Hernawan AH, 2009: 1.3). Dari rumusan pengertian kurikulum tersebut terkandung dua hal pokok, yaitu: (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Sedangkan Hamid Hasan (1988) bahwa istilah kurikulum memiliki 4 dimensi yang saling berkaitan yaitu: (1) kurikulum sebagai suatu kesatuan, (2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum dan (4) kurikulum

sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.

Dari dua pendapat tentang pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi kurikulum terhadap praktek pengajaran adalah bahwa setiap siswa diharapkan dan harus menguasai seluruh mata pelajaran atau rencana tertulis yang diberikan di sekolah dan hal ini menempatkan peran guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Hal ini sejalan dengan undang-undang guru dan dosen bahwa: kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, guru berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mutu pendidikan di tingkat sekolah adalah identik dengan keberhasilan siswa di sekolah dalam menempuh/menjalani kurikulum, mutu pendidikan juga sangat tergantung atas seberapa jauh rencana tertulis atau mata pelajaran dalam kurikulum tersebut dikuasai siswa secara keseluruhan dan penguasaan tersebut biasanya ditunjukkan dengan skor yang diperoleh setelah siswa mengikuti suatu tes atau ujian.

Pengertian kurikulum seperti tersebut di atas adalah pengertian kurikulum dalam arti sempit atau sederhana. Kurikulum dalam pengertian yang luas adalah mencakup semua pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dialami siswa dan dapat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan Harold B. Alpert (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggungjawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Bahkan, Alexander, dan Lewis (1974) menegaskan bahwa kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah (*The curriculum is the sum total of school's efforts to influence learning, wether in the classroom, on the playground, or out of school*).

D. Perkembangan Kurikulum

Perkembangan kurikulum pada pasca kemerdekaan, khususnya kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia bisa kita cermati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan tersebut pembangunan di bidang pendidikan mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Perkembangan kurikulum di tingkat Sekolah Dasar di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:

(1) kurikulum tahun 1947 (rencana pelajaran 1947) adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan dan memakai istilah *leer plan*. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer dari pada curriculum (bahasa Inggris). Kurikulum yang dipakai oleh Bangsa Indonesia adalah rencana pelajaran 1947. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu (a) daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, (b) garis-garis besar pengajaran.

Kurikulum pada tahun ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan kurikulumnya bertujuan tidak menekankan pada pendidikan pikiran, tetapi yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Jadi untuk kurikulum SD masih dipengaruhi oleh zaman kolonial Belanda. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum di awali dari kurikulum 1950.

(2) Kurikulum 1952 (Rencana Pelajaran Terurai 1952)

Usaha yang dilakukan oleh Menteri PP dan K (Mr. Suwandi) untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga akan lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran adalah dalam rangka mengubah sistem itu, maka kurikulum pada

semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula, sehingga yang semula diorientasikan kepada kepentingan kolonial maka kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah bahwa setiap tingkat pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Depdikbud, 1979:108): a) Pendidikan pikiran harus dikurangi, b) Isi pelajaran harus dihubungkan terhadap kesenian, c) Pendidikan watak, (d) Pendidikan Jasmani, e) kewarganegaraan dan masyarakat.

Setelah Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No. 04 Tahun 1950 dikeluarkan, maka:

1. Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak didik agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.
2. Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat
3. Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajar agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat, dan dapat memelihara kemajuan ilmu, dan kemajuan hidup kemasyarakatan

(3) Rencana Pelajaran 1964

Sesuai dengan keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 telah dirumuskan mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional yakni tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (tilaar, 1995:254). Maka pelaksanaan keputusan tersebut di sekolah diimplementasikan ke dalam kurikulum yang dapat menjiwai keputusan MPRS tersebut. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan mengenai pembinaan manusia

Indonesia sebagai berikut: a) Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol/USDEK dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut, b) *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan, c) Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur, d) Ilmu dan teknologi yang tinggi, dan d) Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi

Kurikulum 1964 ini erat kaitannya dengan situasi politik di Indonesia pada zaman itu sehingga dirumuskan bahwa “ pendidikan sebagai alat revolusi dalam suasana berdikari mengharuskan pembantingan setir dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan” (Tilaar, 1995:225). Maka berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, tujuan pendidikan dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi ialah melahirkan warga negara yang sosialis Indonesia yang susila, bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, isi moral pendidikan nasional ialah Pancasila manipol USDEK. Kemudian penetapan Presiden Republik Indonesia No 19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem Pendidikan Nasional Pancasila menjelaskan sistem pendidikan nasional terdiri atas:

1. Pendidikan Biasa (Pendidikan Pra- Sekolah, pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan Tinggi)
2. Pendidikan Khusus
3. Pendidikan Luar Biasa

Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana karena lima kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pada saat itu Pendidikan Dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak.

(4) kurikulum 1968

Lahirnya Orde Baru memberikan warna tersendiri dalam sistem pendidikan di Indonesia, sesuai dengan ketetapan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai bentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Isi dari kurikulum 1968 adalah, mempertinggi mental-moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina/memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yakni dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 dimaksudkan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kalaupun kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, jumlah pelajarannya sembilan.

(5) Kurikulum berorientasi pada pencapaian tujuan (1975-1994)

Pada tahun 1973, GBHN pertama dilaksanakan sebagai keputusan MPR No.II/MPR/1973. Berdasarkan TAP MPR ini dan juga hasil dari beberapa percobaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran maka disusun kurikulum 1975. Untuk pertama kalinya kurikulum ini didasarkan pada tujuan pendidikan

yang jelas. Tujuan pendidikan tersebut dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut.

Kurikulum ini memiliki kelemahan di mana diberlakukan sistem sentralistik dan menganggap bahwa para guru di sekolah-sekolah sampai ke daerah-daerah terpencil mengerti dengan sendirinya tujuan kurikulum. Selain itu setiap usaha pembaharuan pendidikan, pemerintah tidak mengikutsertakan guru sejak awal padahal guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas, sehingga guru bukanlah dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek.

Dalam kurikulum ini, satu hal yang menonjol adalah dengan digunakannya sistem instruksional. Bahwa dalam tiap mata pelajaran, diberikan tujuan kurikulum, dan di tiap bahasan diberikan pula tujuan instruksional bagi guru dan siswa apa yang harus dicapai. Jadi dalam pengajaran, sudah ditentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai setelah proses belajar harus dicapai oleh siswa. Hal ini tentu saja membuat bahan ajar tidak bisa berkembang. Proses belajar ditentukan terlebih dahulu oleh pembuat kebijakan tentang output yang ingin dihasilkan. Siswa dan guru akan cenderung lebih pasif dalam proses belajar mengajar. Adapun ciri-ciri lebih lengkap kurikulum ini adalah sebagai berikut:

1. berorientasi pada tujuan
2. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu
4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.

5. Dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan (drill).

Kurikulum tahun 1968 yang telah dilaksanakan di berbagai sekolah ternyata dipandang kurang sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Sejak tahun 1975 mulai dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum SD 1975. Kurikulum 1975 ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah yang secara umum mengharapkan lulusannya :

1. Memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik,
2. Sehat jasmani dan rohani, dan
3. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran,
4. Bekerja di masyarakat, dan
5. Mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan masukan yang sangat berarti dari hasil komisi pembaharuan pendidikan nasional, begitu pula dengan TAP MPR No. IV/1983, maka lahirlah kurikulum 1984 dengan ciri-ciri menonjol yakni menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut: a) apa yang akan diajarkan?, b) mengapa diajarkan?, dan c) bagaimana diajarkan?

Materi kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan materi kurikulum 1975, yang berbeda adalah organisasi pelaksanaannya, sehingga dengan demikian kurikulum 1984 dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan-bahan dan buku-buku yang ada. Pendekatan proses belajar mengajar pada kurikulum sekolah dasar 1984 diarahkan guna membentuk keterampilan murid

untuk memproses perolehannya. Kurikulum 1984 ini juga memiliki permasalahan yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang diberlakukan secara sentralistik sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah. Keterbatasan dana pun menjadi alasan klasikal dalam pelaksanaan kurikulum ini. Salah satu unsur yang membatasi keberhasilannya antara lain mutu para guru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Di mana CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor.

Perbaikan yang dilakukan dalam kurikulum ini adalah adanya CBSA dan sistem spiral. Di sini, siswa akan lebih dilibatkan dalam pengembangan proses belajar mengajar. Meski sistem instruksional masih tetap dipertahankan, namun siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini pusat pembelajaran mulai bergeser dari *teacher oriented ke student oriented*. Selain itu dengan sistem spiral, di mana tiap jenjang pendidikan mata pelajarannya akan berbeda dari segi kedalaman materi. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka materi yang diberikan akan semakin dalam dan detail. Adapun ciri umum kurikulum ini adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada tujuan instruksional,
2. Pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik,
3. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral,
4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, dan
5. Menggunakan pendekatan keterampilan proses.

(7) Kurikulum 1994

Menyadari akan kebutuhan pembangunan nasional, demikian pula dengan lahirnya Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional No. 02 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, maka di rasa perlu menyusun suatu kurikulum baru sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Kurikulum ini diberlakukan dan dilaksanakan mulai tahun 1994/1995 secara bertahap. Di mulai tahun 1994/1995 diberlakukan untuk kelas 1 dan 4 SD, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Dengan demikian di dalam jangka waktu 3 tahun seluruh kurikulum 1994 telah dilaksanakan.

Adapun ciri umum kurikulum ini adalah:

1. Sifat kurikulum *objective based curriculum*,
2. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan,
3. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada mata pelajaran/isi),
4. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia, dan
5. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik dan sosial.

(8) Kurikulum Berorientasi pada Kompetensi

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Mulai tahun 2004 kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diterapkan di Indonesia. Secara singkat dengan KBK ini ditekankan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan. Menurut Ariantoni (2002) kelebihan kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut: 1) dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata pelajaran di masing-masing daerah, 2) memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya, 3) memberi peluang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya, 4) memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran, 5) meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar, dan 6) memudahkan sistem evaluasi.

Kompetensi dimaksud merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sehingga KBK diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman,, kemampuan, nilai, sikap, dan minat siswa agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk keterampilan, tepat dan berhasil dengan penuh tanggungjawab. KBK mencakup beberapa kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Kegiatan pembelajaranpun diarahkan untuk membantu siswa menguasai kompetensi-kompetensi agar tujuan pembelajaran tercapai.

Depdiknas mengemukakan karakteristi KBK sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal,
2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman,
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi,
4. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi.

Kurikulum berbasis kompetensi ini pada akhirnya juga mengalami perubahan dan perbaikan, hal ini tentu terjadi karena kurikulum ini sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dan tuntutan kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Sejak tahun 2001, berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah diberlakukan Otonomi Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem

penilaiannya, guru dan kepala sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Muslich, 2009:1).

Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan (muhaimin, dkk, 2008:2). Guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolahnya.

c. Kurikulum 2013

Pemeberlakuan kurikulum 2013 ini adalah sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah diterapkan selama lebih kurang 6 tahun. Dalam pemaparannya di Griya Agung Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikulum terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar adalah menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi (TI). Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memiliki tanggungjawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan kepada siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Seperti yang dirilis Kemendikbud dalam : kemendikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberikan perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013, yaitu:

1. Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46,
2. Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa,
3. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertidak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya, dan
4. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa,

Dari beberapa harapan diatas, maka dalam implemenasi kurikulum 2013 diperlukan pemahaman/persepsi yang sama bagi warga sekolah serta kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh guru dan kepala sekolah pada setiap lembaga pendidikan. Tanpa adanya komitmen yang baik antar warga sekolah dalam pelaksanaan kurikulum, maka sebegus apapun suatu kurikulum tidak akan berarti.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar pada Kabinet Joko Wi setelah pelantikan dan disampaikan pada Stasiun TV- swasta, bahwa: keberhasilan pendidikan sangat tergantung kepada para guru yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, kurikulum yang baik jika tidak didukung oleh kompetensi guru dan kepala sekolah maka hasilnya tidak baik juga.

Jika kita cermati sejak diberlakukannya kurikulum pertama kali pada sistem pendidikan atau persekolahan kita sampai saat sekarang ini, maka kurikulum kita sudah mengalami banyak sekali perubahan dan perbaikan. Jika dikaji dari segi waktu, perubahan dan perbaikan kurikulum sepanjang waktu tersebut bisa dianggap wajar. Ketidakwajaran bisa terjadi apabila perubahan dan

perbaikan kurikulum tersebut tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan justru terjadi penurunan kualitas pendidikan.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong kemampuan siswa lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran di sekolah.

Simpulan

Mengajar adalah suatu fenomena daya tarik bagi kalangan guru, di mana bagian-bagian dari proses belajar-mengajar saling bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Bila sesuatu tugas/pekerjaan dikerjakan dengan baik pada permulaan atau awal maka tahap-tahap berikutnya dapat ditemukan sebagai penerapan perubahan yang baik. Suatu upaya pemberdayaan guru/pendidik yang memicu dan melahirkan mereka bertanggungjawab dan terlibat dalam proses pertumbuhan perbaikan sangat diharapkan. Keberhasilan pada permulaan yang disertai tanggungjawab dan usaha perbaikan akan mempunyai implikasi luas perubahan dan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah.

Pendidik/guru dan apa yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun membutuhkan perhatian perbaikan instruksional, terutama sekali langkah penerapan sabagai satu usaha yang dilakukan harus dengan sungguh-sungguh serta dengan mental yang baik ke arah perbaikan pengajaran harus selalu diperhatikan. Dalam hal yang sama dapat dikatakan bahwa mengajar dan usaha perbaikan untuk pengajaran yang efektif dapat dihasilkan dari perhatian, kepedulian, serta tanggungjawab mendidik yang ada pada diri para guru.

Kemampuan-kemampuan pedagogis yang dimiliki guru, akan memberi peluang untuk mengembangkan sistem pembelajaran kedalam praktek

pembelajaran yang berorientasi pada pebelajar. Berbagai alternatif perancangan dan pengembangan pembelajaran menjadi penting dalam menyikapi karakteristik perilaku pebelajar dan materi pelajaran agar kompetensi yang dimiliki guru mampu diimplementasikan dalam sistem pembelajaran yang sedang berlangsung.

Kompetensi pedagogis yang dimiliki guru akan menunjang tugas dan kewajiban guru dalam mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan proses dan hasil belajar yang diharapkan, Aspek sarana dan sumber belajar yang cukup dan bervariasi akan menunjang, memperkaya wawasan belajar siswa.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong kemampuan peserta didik lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberty, Harold B. (1965). *Reorganizing the High School Curriculum*. New York: The Macmillan Company.
- Ariantono. (2002) . *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD, SLTP dan SMU (Disampaikan pada Seminar Nasional “ Menyongsong Kurikulum Bahasa Indonesia Berbasis **Kompetensi : Peluang dan Tantangan: pada tanggal 24 April 2002 di UPI Bandung.***
- Balitbang. Depdikbud. (1984). *Kurikulum Sekolah Dasar: landasan Program dan Pengembangan.*
- Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Depdikbud. (1968) *Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta
- Dharma.(2002). Pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam A. Usman (editor), *Paradigma baru MSDM*. Jogjakarta: Penerbit Amara Books
- Hamalik, O. (1990). *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, S.H.(1988). *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: P2PLPTK.

<http://cmslokopedia.widiyanto.com/berita-141-7-aspek-kompetensi-pedagogik-guru.html>. Oktober 2014.

Sukmadinata, N.S. (1988). *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Depdikbud. Jakarta: 1988

Yunus, dkk. *Keterampilan Menulis*. Penerbit: universitas Terbuka